



---

## Pola Komunikasi Asosiasi Imperatif Ralf Dahrendorf: Relasi Pengurus Himpunan dan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan

Amanda Saputri<sup>S1</sup>, Azzahra Isnii Azizah<sup>2</sup>, Fahmi Hafidin Bachtiar<sup>3</sup>, Naila Feyza Ghafir<sup>4</sup>, Achmad Hufad<sup>5</sup>, Yani Achdiani<sup>6</sup>

Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [amandasaputri@student.upi.edu](mailto:amandasaputri@student.upi.edu), [azzahrazizah@student.upi.edu](mailto:azzahrazizah@student.upi.edu), [fahmihafidin007@student.upi.edu](mailto:fahmihafidin007@student.upi.edu), [feyzaghafiraa@studen.upi.edu](mailto:feyzaghafiraa@studen.upi.edu), [achmadhufad@upi.edu](mailto:achmadhufad@upi.edu), [yaniachdiani@upi.edu](mailto:yaniachdiani@upi.edu)

---

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This research examines the dynamics of student organizations, which often trigger internal conflicts due to differences in position and authority between administrators and regular members. This conflict is caused by differences in position and authority between administrators and regular members. Using Ralf Dahrendorf's sociological theory of conflict, organizational structure can be understood as an authoritatively coordinated system. In this system, communication patterns are crucial for maintaining stability. The purpose of this study was to analyze how communication patterns are formed between student association administrators and Civics students. This study used a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with the Vice Chair of the Student Association and a Google Form questionnaire distributed to Civics students. The results showed that the communication pattern used by student association administrators is two-way. This means that communication is not only top-down but also bottom-up. Administrators use formal and informal communication channels to listen to student aspirations and mitigate potential conflicts. Although administrators still hold a higher position, this inclusive communication approach is effective in minimizing student resistance. It can be concluded that by managing adaptive communication patterns, conflicting interests can be harmonized. In this way, organizational harmony can be maintained.*

**Keywords:** Imperative Association, Communication Patterns, Ralf Dahrendorf, Student Association.

### ABSTRAK

*Penelitian ini melatarbelakangi fenomena dinamika organisasi mahasiswa yang sering kali memicu konflik internal akibat perbedaan posisi dan otoritas antara pengurus dan anggota biasa. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan posisi dan otoritas antara pengurus dan anggota biasa. Dengan menggunakan teori sosiologi konflik dari Ralf Dahrendorf, struktur organisasi dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang dikoordinasikan secara otoritatif. Dalam sistem ini, pola komunikasi sangat penting untuk menjaga stabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pola komunikasi terbentuk antara pengurus himpunan dan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Wakil Ketua Himpunan dan kuesioner berupa Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa PKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang digunakan*

---

oleh pengurus himpunan adalah dua arah (*two-way communication*). Artinya, komunikasi tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Pengurus menggunakan saluran komunikasi formal dan informal untuk mendengar aspirasi mahasiswa dan meredakan potensi konflik. Meskipun pengurus masih memiliki posisi yang lebih tinggi, pendekatan komunikasi yang inklusif ini efektif dalam meminimalkan resistensi dari mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa dengan mengelola pola komunikasi yang adaptif, kepentingan yang saling bertentangan dapat diselaraskan. Dengan demikian, keharmonisan organisasi dapat tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Asosiasi Imperatif, Pola Komunikasi, Ralf Dahrendorf, Himpunan Mahasiswa.

## PENDAHULUAN

Organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah ruang vital dalam pembangunan kapasitas mahasiswa, khususnya dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, dan internalisasi nilai-nilai demokrasi. Di lingkungan perguruan tinggi, himpunan mahasiswa hadir sebagai wadah kolektif yang tidak hanya mengelola kegiatan akademik maupun non-akademik, tetapi juga menjadi sebuah arena praktik komunikasi organisasional yang kompleks. Dalam konteks ini, pola komunikasi antara pengurus himpunan dan anggotanya menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bersama (Effendy, 2019)

Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH) merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan para Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia yang menjalankan roda organisasi berdasarkan produk hukum internal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Himpunan (Wakahim) HMCH, Raffi Hojinul Asro, organisasi ini menempatkan musyawarah mufakat sebagai landasan pengambilan keputusan dan menjadikan kolektivitas anggota sebagai basis legitimasi setiap produk hukum yang dihasilkan. Pendekatan ini mencerminkan karakter organisasi yang berorientasi pada keadilan prosedural sekaligus kebermanfaatannya kolektif.

Fenomena organisasi semacam ini relevan untuk dikaji melalui perspektif teori Asosiasi Imperatif Ralf Dahrendorf. Dahrendorf (1959/2022) memandang bahwa setiap asosiasi terkoordinasi secara imperatif (*Imperatively Coordinated Association/ICA*) senantiasa mengandung 2 dua posisi struktural, yakni mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang berada di bawah otoritas. Relasi antara kedua posisi inilah yang menjadi sumber potensial konflik sekaligus wahana dalam pembentukan pola komunikasi. Dalam konteks HMCH, relasi antara pengurus himpunan sebagai pemegang otoritas dan mahasiswa anggota sebagai pihak yang tunduk pada produk hukum organisasi membentuk sebuah dinamika komunikasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.

Wakahim HMCH menegaskan bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya, namun pemaksaan tersebut dilegitimasi melalui keterlibatan seluruh anggota dalam proses pembentukan produk hukum. Pernyataan ini mencerminkan dualisme antara otoritas formal dan partisipasi demokrasi yang menjadi ciri khas asosiasi imperatif versi Ralf Dahrendorf. Oleh karena itu, Penelitian ini hadir untuk mengkaji bagaimana pola komunikasi yang

terbentuk dalam relasi imperatif tersebut, dan bagaimana organisasi mengelola perbedaan pendapat agar tidak berkembang menjadi konflik destruktif.

Penelitian ini mengidentifikasi masalah utama tentang bagaimana pola komunikasi asosiasi imperatif menurut perspektif Ralf Dahrendorf terwujud dalam relasi antara pengurus Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH) dan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Masalah ini diuraikan menjadi dua sub bab-masalah. Yang pertama, Bagaimana struktur otoritas dalam HMCH membentuk pola komunikasi antara pengurus dan anggota himpunan. Dan yang kedua, bagaimana mekanisme musyawarah mufakat digunakan sebagai instrumen pengelolaan konflik komunikasi dalam HMCH.

Untuk mempertegas posisi akademik, keaslian, dan unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial. Telaah difokuskan pada tiga ranah utama: dinamika organisasi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, pola komunikasi organisasi, serta aplikasi teori sosiologi konflik Ralf Dahrendorf di lingkungan kampus.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewantara, dkk. (2023) berjudul "*Peran Himpunan Mahasiswa (Hima) Terhadap Pengembangan Public Speaking pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNTAN*". Penelitian kualitatif deskriptif ini berfokus pada fungsi Himpunan Mahasiswa PPKn sebagai wadah laboratorium kewarganegaraan (*civic laboratory*) untuk mengasah *soft skill* mahasiswa, khususnya kemampuan berbicara di depan umum (*public speaking*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja dan interaksi di dalam himpunan berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan karakter warga negara yang cakap komunikatif.

Kedua, penelitian literatur oleh Zahara (2018) dengan judul "*Peranan Komunikasi Organisasi bagi Pimpinan Organisasi*". Melalui metode *library research*, penelitian ini membedah urgensi penguasaan komunikasi verbal maupun nonverbal bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan roda organisasi. Zahara (2018) menyimpulkan bahwa pemimpin bertindak sebagai komunikator utama yang memegang kendali atas motivasi, penyampaian informasi, efektivitas kerja, dan pengawasan internal anggota demi tercapainya tujuan kolektif.

Ketiga, artikel fungsional-komparatif oleh Handayani (2025) yang berjudul "*Komunikasi sebagai Instrumen Kepemimpinan: Analisis Komparatif Dinamika Internal HIMAKSI dan HIMAPLIK*". Penelitian ini membandingkan dinamika internal dua himpunan mahasiswa jurusan melalui kacamata gaya kepemimpinan. Temuan penelitian menunjukkan adanya dikotomi pola komunikasi: disatu sisi himpunan yang berhasil membangun iklim organisasi terbuka, partisipatif, dan profesional, dan disisi lain masih terdapat himpunan yang sangat kaku, formal, dan mengandalkan pola komunikasi instruksional yang berpusat pada hierarki pimpinan (*top-down*).

Keempat, kajian sosiologi konflik oleh Syafiti dan Warsono (2021) yang berjudul "*Primordialisme dalam Praktek Demokrasi di Organisasi Kemahasiswaan (Konflik Sosial dalam Pemira BEM UNESA 2020)*". Penelitian ini secara eksplisit mengadopsi teori sosiologi konflik Ralf Dahrendorf untuk membedah akar

kerusakan pada kontestasi politik kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik struktural di lingkungan mahasiswa dipicu oleh distribusi kekuasaan yang tidak merata (*unequal distribution of power*), perebutan eksistensi antar-kelompok, serta benturan kepentingan laten yang menjelma menjadi kepentingan manifes di kalangan kelompok *superordinate* (penguasa) dan *subordinate* (terkuasai).

Berdasarkan kajian terhadap keempat litelaur diatas, terlihat adanya celah kosong (*research gap*) yang belum tersentuh. Peneliti terdahulu cenderung melihat komunikasi di tingkat himpunan sebagai instrumen fungsional untuk menyukseskan program kerja (Handayani, 2023; Zahara, 2018) atau sebagai media edukasi murni (Dewantara et al., 2023). Di sisi lain, aplikasi teori Dahrendorf di kampus sejauh ini baru digunakan pada level politik makro yang melibatkan konflik terbuka, seperti Pemira UNESA (Syafitri & Warsono, 2021).

Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji relasi antara pengurus dan anggota HMCH dari perspektif asosiasi imperatif Dahrendorf, terutama dalam konteks bagaimana mekanisme musyawarah mufakat berfungsi sebagai penyeimbang antara imperatif otoritas dan partisipasi demokratis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih kontekstual.

Berdasarkan rumusan masalah dan kesenjangan pengetahuan yang telah diidentifikasi, terdapat 2 tujuan utama dari penelitian ini, sebagai berikut. (1) Mendeskripsikan pola komunikasi yang terbentuk dalam relasi antara pengurus HMCH dan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kerangka asosiasi imperatif Ralf Dahrendorf. (2) Menganalisis mekanisme musyawarah mufakat sebagai strategi pengelolaan konflik komunikasi dalam struktur organisasi HMCH.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui desain Studi Kasus (*Case Study*). Pemilihan metode kualitatif deskriptif ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan secara mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks dalam latar alamiah (*natural setting*) tanpa adanya intervensi dari penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada penyelidikan kontemporer yang mendalam terhadap suatu sistem terikat (*bounded system*), yaitu Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH) pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana Teori Asosiasi Imperatif (*Imperatively Coordinated Association*) dari Ralf Dahrendorf yang termanifestasikan dalam pola komunikasi sehari-hari, relasi kekuasaan, serta mekanisme penyelesaian yang berbenturan dengan kepentingan antara pengurus himpunan (*superordinate*) dan mahasiswa selaku anggota (*subordinate*) (Yin, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH), yang secara administratif bernaung di bawah Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

(FPIPS), Universitas Pendidikan Indonesia. Pemilihan ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan karakteristik unik yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Sebagai entitas akademis di bawah prodi Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa di lingkungan ini secara teoritis menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, kesetaraan hukum, dan deliberasi publik di ruang kelas. Namun, di sisi lain, organisasi HMCH mengadopsi prinsip fungsional hukum murni melalui jargon kekuasaan bahwa "*hukum tidak akan berjalan ketika tidak ada pemaksaan di dalamnya*". Paradoks antara doktrin akademis yang demokratis dan struktur organisasi yang bersifat imperatif inilah yang menjadikan HMCH sebagai lokus penelitian yang sangat relevan dan kaya akan data empiris.

Dalam penelitian kualitatif ini, kehadiran lapangan bertindak sebagai instrumen utama sekaligus pengumpulan data kunci (*researcher as a key instrument* atau *human instrument*) (Sugiyono, 2019). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, mendengar, merasakan, dan menginterpretasikan konseptualisasi pola komunikasi imperatif yang terjadi.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bersifat non-partisipan penuh (*non-participant observer*) atau partisipan moderat, di mana peneliti membatasi diri untuk tidak mengintervensi atau memengaruhi dinamika internal, pembuatan kebijakan, maupun proses penegakan produk hukum di HMCH. Peneliti menjaga jarak profesional yang objektif guna menghindari bias, namun tetap membangun hubungan interpersonal yang baik (*rapport*) dengan pengurus dan anggota agar proses penggalian informasi dan data dapat berlangsung secara terbuka dan alamiah.

Sasaran dari penelitian ini terbagi menjadi dua dimensi struktural sesuai dengan postulat Ralf Dahrendorf mengenai pembagian otoritas dalam *Imperatively Coordinated Association* (ICA).

1. Subjek Penelitian

Relasi Kekuasaan asimetris dan pola komunikasi (koordinatif, maupun resolutif)

2. Informan Penelitian

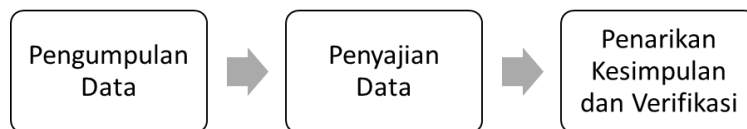
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria khusus yang dinilai memahami masalah penelitian secara mendalam dan memegang otoritas informasi yang valid (Miles et al, 2020).

Informan dalam penelitian ini meliputi 2 elemen utama, yaitu Wakil Ketua Himpunan (Wakahim) sebagai informan kunci dan mahasiswa aktif program studi Pendidikan Kewarganegaraan yang berstatus sebagai anggota biasa (bukan pengurus inti).

Untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan saling melengkapi, peneliti menerapkan teknik triangulasi data melalui metode pengumpulan data utama.

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)
2. Observasi Lapangan
3. Studi Dokumentasi

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga selesai di lapangan melalui tiga tahapan utama.



**Gambar 1: Teknik Analisis Data**

1. **Konsendasi Data (*Data Condensation*)**  
Peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang data yang tidak diperlukan dari hasil transkrip wawancara dengan Wakahim dan anggota. Data kemudian dikelompokkan ke dalam kode-kode (*coding*) tertentu, seperti kode “Otoritas Imperatif”, “Musyawarah Mufakat”, “Kolektivitas Anggota”, dan “Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan)”.
2. **Penyajian Data (*Data Display*)**  
Data yang telah dikondensasikan disajikan dalam bentuk teks naratif, dan bagan alur hubungan. Penyajian data diarahkan untuk memperlihatkan bagaimana jalinan komunikasi dikotomis terwujud, dan bagaimana mekanisme akomodasi konflik (melalui peninjauan rasionalitas atas ketidaksetujuan individu terhadap produk hukum).
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)**  
Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari setiap pola yang konsisten. Kesimpulan awal yang masih kabur akan diverifikasi secara terus menerus seiring bertambahnya data di lapangan. Kesimpulan akhir ditarik setelah ada bukti-bukti yang valid dan konsisten, yang mampu menjawab bagaimana Pola Komunikasi Asosiasi Imperatif Ralf Dahrendorf bekerja di tengah mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH) pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan beroperasi secara struktural sebagai sebuah *Imperatively Coordinated Association* (ICA) atau asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Dalam konteks ini, relasi antara pengurus himpunan dan mahasiswa himpunan tidak berjalan dalam ruang yang hampa, melainkan dikondisikan oleh distribusi otoritas yang asimetris namun tetap harmonis. Berdasarkan data wawancara mendalam dengan Wakil Ketua Himpunan (Wakahim) HMCH, Raffi Hojinul Asro, ditemukan fakta empiris bahwa roda organisasi dikendalikan melalui produk hukum internal yang ketat. HMCH memegang patokan ideologis yang tegas dalam menjalankan organisasinya, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Himpunan (Wakahim) HMCH itu sendiri bahwa

"*hukum tidak akan berjalan ketika memang tidak ada pemaksaan di dalamnya*". Ini menjadi basis legitimasi bagi pengurus sebagai kelompok *superordinate* untuk memproduksi dan melaksanakan komunikasi kepada anggota sebagai kelompok *subordinate*.

Meskipun terdapat unsur "pemaksaan", pengurus HMCH tidak mentransmisikannya melalui pola komunikasi represi satu arah yang otoriter. Sebaliknya, data lapangan menunjukkan adanya pola komunikasi hibrida yang mengawinkan imperatif hukum dengan pendekatan kultural *sense of belonging* (rasa memiliki). Penegakan aturan dan sanksi dilakukan secara desentralisasi oleh badan pelaksana hukum internal yang spesifik. Unikinya, di tengah struktur yang imperatif ini, konflik terbuka berskala besar antara pengurus inti himpunan dan anggota himpunan jarang atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Hal ini dikarenakan pengurus menetapkan pola komunikasi partisipatif dalam pembentukan hukum, dimana seluruh produk hukum bersumber langsung dari "keresahan" mahasiswa itu sendiri dan melibatkan seluruh elemen anggota dalam proses perancangannya.

Untuk mempermudah pemetaan temuan data lapangan mengenai pola komunikasi asimetris yang diterapkan di lingkungan HMCH, berikut disajikan rangkuman hasil analisis dalam tabel dibawah ini.

**Table 1 : Rangkuman Hasil Analisis Temuan Data Lapangan**

Dimensi Analisis	Temuan Data Empiris Lapangan di HMCH	Pola Transmisi Komunikasi
Basis Legalitas Otoritas	Adanya produk hukum tertulis.	Formal, tekstual, dan mengikat seluruh anggota secara struktural.
Doktrin Kekuasaan	Prinsip operasional organisasi: " <i>hukum tidak akan berjalan ketika memang tidak ada pemaksaan di dalamnya</i> ".	Imperatif-koersif, menuntut kepatuhan mutlak atas aturan yang sah.
Diferensiasi Eksekutif	Pembagian kerja penegakan aturan secara spesifik.	Top-Down, instruksional, berpusat pada spesialisasi jabatan (birokratis).
Kanalisis Aspirasi	Pengintegrasian 3 tujuan hukum (Kepastian, Keadilan, Kebermanfaatan) bersumber dari keresahan bersama.	Bottom-Up, akomodatif, berorientasi pada kolektivitas anggota.

<b>Resolusi Resistensi</b>	Peninjauan ulang ( <i>review</i> ) produk hukum apabila ketidaksetujuan individu dinilai sangat rasional.	Dialogis-rasional, musyawarah mufakat, menghindari represi fisik.
----------------------------	---	---

Ketika perdebatan dan benturan kepentingan dalam pembentukan produk hukum atau pelaksanaan program kerja terjadi, yang menurut informan merupakan “suatu kepastian yang tidak bisa dihindari”. HMCH mengatasinya melalui mekanisme komunikasi musyawarah mufakat. Pengurus memandang bahwa perbedaan pandangan merupakan “sebuah keindahan” dan menempatkan setiap suara sebagai aspirasi konstruktif. Jika terdapat individu dari kelompok *subordinat* yang tidak menyetujui produk hukum yang telah disahkan, pengurus menyediakan ruang deliberatif khusus untuk “meninjau rasionalitasnya”. Apabila alasan penolakan tersebut terbukti sangat rasional secara logis dan objektif, pengurus akan melakukan pengkajian ulang (*review*) terhadap produk hukum tersebut. Dalam menjaga stabilitas organisasi, Wakahim HMCH menekankan pentingnya membangun pola komunikasi yang sehat melalui konstruksi “*kepemimpinan yang komunikatif*” dan pelaksanaan evaluasi berkala yang secara langsung mempengaruhi perbaikan pada performa kerja organisasi untuk kedepannya.

### ***Analisis Perspektif Asosiasi Imperatif Ralf Dahrendorf***

Konseptualisasi pola komunikasi di lingkungan Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH) apabila dibedah menggunakan kacamata teori konflik Ralf Dahrendorf menunjukkan adanya dinamika struktural yang sangat unik. Dahrendorf (2022), memandang bahwa masyarakat dan organisasi modern bukan sebagai suatu kesatuan yang statis, melainkan sebagai sebuah *Imperatively Coordinated Association* (ICA) atau asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif, dimana posisi-posisi di dalamnya didistribusikan berdasarkan kepemilikan otoritas (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Struktur organisasi ICA selalu bersifat dikotomis, yang secara alamiah membagi aktor kedalam dua kelompok posisi struktural: kelompok *superordinate* yang memiliki otoritas untuk memberikan perintah, dan kelompok *subordinate* yang tidak memiliki kewenangan atas otoritas dan wajib mematuhi perintah tersebut (Nendissa, 2022).

Dalam lokus penelitian di HMCH ini, jajaran pengurus yang direpresentasikan oleh Ketua Himpunan, Wakil Ketua Himpunan, hingga Bendahara Umum secara sosiologis menempati posisi *superordinate*. Sementara itu, seluruh mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan yang berstatus sebagai anggota menempati posisi *subordinate*. Diferensiasi kelas struktural ini menciptakan jarak kekuasaan yang sah (*legitimate power*) karena hak untuk mengontrol tindakan orang lain melekat pada peran jabatan formal, bukan didasarkan pada dominasi fisik individual (Nendissa, 2022).

Namun, yang menjadi kebaruan temuan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah bagaimana produk hukum ditransmisikan melalui pola komunikasi yang tidak melahirkan disintegrasi destruktif. Dahrendorf berasumsi bahwa ketimpangan distribusi otoritas dalam ICA secara alamiah melahirkan kepentingan laten (*latent interests*) yang kontradiktif antar-kelas, yang apabila mengkristal menjadi kepentingan manifes (*manifest interests*) akan memicu konflik sosial terbuka (Dharmawan, 2019). Konflik pada dasarnya merupakan manifestasi dari perjuangan aktor atau kelompok untuk memperebutkan nilai, status, kekuasaan, atau otoritas tertentu (Dharmawan, 2019). Di HMCH, potensi benturan kepentingan manifes antara pengurus dan anggota berhasil diredam dan dikanalisis melalui rekayasa pola komunikasi organisasi yang desentralistik dan akomodatif. Pelaksanaan penegakan aturan tidak berpusat pada represi satu pintu, melainkan dibagi secara fungsional melalui badan pelaksana hukum internal yang spesifik.

Fakta bahwa tidak ada anggota HMCH yang merasa keberatan terhadap produk hukum membuktikan adanya keberhasilan manajemen konflik organisasi. Seperti yang dikaji oleh Pratiwi (2021), pandangan sosiologi kontemporer terhadap konflik organisasi telah bergeser. Konflik tidak lagi dipandang sebagai gejala yang sepenuhnya merusak (*destructive*), melainkan dapat menghasilkan konsekuensi yang konstruktif dan fungsional apabila dikelola dengan penanganan yang tepat. Pengurus HMCH menerapkan manajemen konflik yang berorientasi pada integrasi dengan cara melibatkan seluruh elemen anggota sejak proses pembentukan produk hukum. Komunikasi yang dibangun bersifat *bottom-up*, dimana produk hukum yang dibuat atas dasar “keresahan” nyata dari mahasiswa itu sendiri, yang kemudian diformulasikan berdasarkan tiga tujuan hukum: kepastian, keadilan, dan kebermanfaatn hukum. Langkah ini berhasil menyatukan kepentingan laten kelompok *subordinate* ke dalam kepentingan manifes kelompok *superordinate*.

Terlebih lagi, latar belakang subjek penelitian sebagai mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan memberikan corak khas pada model asosiasi imperatif ini. Mahasiswa di lingkungan ini memiliki sensitivitas akademis yang tinggi terhadap isu keadilan prosedural. Oleh karena itu, jika terdapat perdebatan dalam perancangan produk hukum atau pelaksanaan program kerja yang oleh Wakahim disebut sebagai “kepastian yang tidak bisa dihindari”, pengurus HMCH memilih jalan musyawarah mufakat dan memandang perbedaan sebagai “suatu keindahan”. Ketika terdapat individu yang tidak menyetujui produk hukum, pengurus menyediakan saluran komunikasi dialogis berupa “tinjauan rasionalitas”. Jika kedapatan anggota tersebut terbukti logis dan objektif, pengurus berkomitmen melakukan pengkajian ulang (*review*).

Pola komunikasi yang demokratis-partisipatif di tengah struktur hukum yang imperatif ini dimungkinkan karena pengurus HMCH berhasil mempraktikkan gaya kepemimpinan yang komunikatif. Berdasarkan teori perilaku organisasi, keberhasilan pencapaian tujuan dan stabilitas iklim organisasi dalam lembaga pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk membangun komunikasi yang interaktif, terbuka, dan melakukan evaluasi berkala yang berdampak pada perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan (Trisnawati dkk. 2023). Dengan menerapkan kepemimpinan komunikatif dan evaluasi yang ajek,

---

HMCH berhasil mentransformasikan wajah *Imperatively Coordinated Association* Ralf Dahrendorf yang teoritisnya kaku dan sarat pemaksaan, menjadi sebuah sistem keorganisasian mahasiswa yang efektif, kompleks, namun tetap humanis dan diterima secara kolektif oleh seluruh anggotanya.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi yang terbentuk dalam relasi antara pengurus HMCH dan mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan merefleksikan model *Imperatively Association Coordinated* (ICA) dari Ralf Dahrendorf yang unik, dimana dikotomi otoritas struktural tidak melahirkan konflik destruktif melainkan sebuah integrasi sistem yang dinamis. Melalui instrumen regulasi internal, pengurus selaku kelompok *superordinate* memang menjalankan pola komunikasi imperatif (*top-down*) berbasis pemaksaan hukum demi menjaga stabilitas keorganisasian. Namun, potensi berbenturan dengan mahasiswa selaku kelompok *subordinate* yang memiliki nalar kritis dan sensitivitas demokratis berhasil diredam melalui rekayasa komunikasi hibrida yang akomodatif. Mekanisme musyawarah mufakat dan saluran "tinjauan rasionalitas" terbukti berfungsi sebagai strategi pengelolaan konflik yang sangat fungsional, di mana aspirasi serta keresahan anggota dikanalisis dan diintegrasikan secara prosedural ke dalam pembentukan hukum formal berbasis asas kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya. Karakteristik kepemimpinan yang komunikatif disertai pengkondisian organisasi melalui pendekatan *sense of belonging* pada akhirnya berhasil mentransformasikan wajah asosiasi imperatif yang secara teoritis kaku menjadi sebuah ekosistem keorganisasian mahasiswa yang kompleks, efektif, namun tetap humanis serta memperoleh legitimasi kolektif yang kuat.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bagi fungsionaris organisasi kemahasiswaan sejenis untuk terus mempertahankan gaya kepemimpinan interaktif dan ruang evaluasi berkala guna memelihara keseimbangan iklim organisasi antara penegakan aturan formal dan partisipasi demokratis anggota. Selain itu, penelitian ini memberikan saran bagi agenda riset di masa depan yang relevan untuk memperluas lokus kajian pada organisasi kemahasiswaan dengan latar belakang disiplin keilmuan yang berbeda, seperti ilmu eksakta atau teknik, guna menguji secara komparatif apakah tingkat kekritisian akademis anggota dan corak produk hukum internal memberikan pengaruh yang sama terhadap elastisitas pola komunikasi asimetris dalam struktur asosiasi imperatif.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen mata kuliah Teori-Teori Sosiologi, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HMCH) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu kami dalam melakukan proses pelaksanaan penelitian hingga akhirnya penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terima kasih disampaikan

kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses pengumpulan data hingga penyusunan penelitian. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi karya ilmiah ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahrendorf, R. (2022). *Class and Conflict in an Industrial Society* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003260257> (Karya asli diterbitkan 1959).
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Ulfa, M., & Afandi, W. (2023). Peranan Himpunan Mahasiswa (Hima) Terhadap Pengembangan Public Speaking pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNTAN. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1–11.
- Dharmawan, A. (2019). THE CORPORATE WASTE MANAGEMENT CONFLICT BETWEEN THE SOCIETY AND COMPANY. *Jurnal Partisipatoris*. <https://doi.org/10.22219/jp.v1i2.8619>.
- Effendy, O. U. (2019). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Handayani, T. (2025). Komunikasi sebagai Instrumen Kepemimpinan: Analisis Komparatif Dinamika Internal HIMAKSI dan HIMAPLIK. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 5(1), 107–114. <https://doi.org/10.37676/professional.v12i1.8327>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nendissa, J. E. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3), 69–76. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v4i3.53615>
- Pratiwi, M. A. (2021). Perkembangan teori konflik organisasi. *Jurnal Manajerial dan Bisnis Tanjungpinang*, 4(1), 51–65. <https://doi.org/10.52624/manajerial.v4i1.2209>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, r&d dan penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Syafitri, H., & Warsono. (2021). Primordialisme dalam Praktek Demokrasi di Organisasi Kemahasiswaan (Konflik Sosial dalam Pemira BEM UNESA 2020). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 9(3), 672–688. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p672-688>
- Trisnawati, S. N. I., Agusniati, A., Iriani, N., Putera, W., Sanjaya, R., Hafidz, M. A., Darmawati, D., Elpisah, E., Hidayati, A., Pratikna, R. N., & Singke, A. M. (2026). KEPEMIMPINAN DAN PERILAKU ORGANISASI PENDIDIKAN. Penerbit Tahta Media, 1(1). Retrieved from <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1928>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi Organisasi bagi Pimpinan Organisasi. *Jurnal Warta*, (Edisi 56), 1-12. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.8>